

PENGADAAN BARANG/JASA - KODE ETIK
2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 3, BD 2020/NO. 3, 11 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK : - Kebutuhan Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa serta berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018; PERLKPP No. 9 tahun 2018; PERLKPP No.14 Tahun 2018; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2018 ; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 2 Tahun 2018.

- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur perilaku pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ), untuk menghindari konflik kepentingan saat menjalankan tugas. Ruang lingkup Perbup ini meliputi prinsip pengadaan barang/jasa, pembentukan kelembagaan non struktural, penegakan kode etik, dan sanksi. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pegawai wajib menjunjung nilai dasar seperti taat pada peraturan, mengutamakan kepentingan negara, dan menjunjung tinggi integritas. Selain itu, mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip seperti integritas, kredibilitas, objektivitas, efisien, efektif, transparan, terbuka, profesionalisme, adil, dan akuntabel. Dalam Perbup ini disebutkan tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati, dan memiliki tugas mengawasi perilaku pegawai BPBJ. Perbup ini juga mengatur tata cara pengaduan, pelaporan, dan pemeriksaan pelanggaran kode etik. Jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai BPBJ yang melanggar meliputi sanksi moral (permohonan maaf tertulis) dan sanksi administratif (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, dan rekomendasi mutasi).

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan 14 Juni 2020.